Risalah Politik Perempuan

Media Massa dan Gerakan *Counter Hegemony*

Dear Tsabita & Taffa Gusti anakku sing wis iso mlaku,
Maafkan ayah & bundamu yang cuma bisa beli susu di hari wadagmu.
Tapi biar Gusti Allah yang cuma tahu,
Bahwa cinta ayah & bundamu lebih dari sekedar itu.
Juga tetaplah beri sayang buat ayah & bundamu yang buka pintu,
Hingga mentari bisa beri salam pada hirup hidup di nafas pertamamu.
Tetaplah berjalan dengan senyum di hari-harimu,
Agar susah kami sedikit semu.
Dan jika memang masih kurang kami berlaku,
Biarlah hidup ayah & bundamu jadi tumbal buat bahagiamu,
Dan susah ayah & bundamu jadi mentari di hari-harimu.
Lakonilah hidup seperti dirimu,
Karena kami percaya Gusti Allah akan terus menjagamu.
Teruslah besar dan kuat duhai anakku.
Kami tak akan lelah jadi abdimu.
Tegar dan cemerlanglah pujaanku,
Meski renta dan lelah kami tak pernah ingin bergayut di pundakmu.
Anakku ……

Persembahan

Orang tua loen sayang:
Drs. H. Abdul Wahid Hanafiah dan Ummi Hj. St Maryam Sulaiman
Untuk suami tercinta yang selalu jujur menyatakan kritik:
Mulyono Misman
Dua anakku *(Aneuk muteuwah boh hate Ma ngen Du)*:
Tsabita Najla Mulyono dan Taffael Musyaffa Mulyono

Buku adalah mata akal yang lahir dari pencerahan akal budi
dan nurani. Buku mampu melahirkan kesadaran, cinta dan pergulatan.

RISALAH POLITIK PEREMPUAN

Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony



Dr. Umaimah Wahid, M.Si.



Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan *Counter Hegemony*

Penulis : Dr. Umaimah Wahid, M.Si.
Editor : A. Rachmatullah
Tata Letak : Empat Pena Publishing
Design Cover : Empat Pena Publishing
Pemeriksa Aksara : Sri Retno Susanti

Diterbitkan oleh :
Empat Pena Publishing
Jl. Kali Pasir No. 36, Sukasari
Tangerang, Banten 15118
Mobile : 0812-1000-7656
Email : empatpena@gmail.com

xliv + 320 halaman
ISBN : 978-602-17908-5-4
Cetakan I : Maret 2014

Katalog Dalam Terbitan
Dr. Umaimah Wahid, M.Si.
Risalah Politik Perempuan: Media Massa
dan Gerakan *Counter Hegemony*
Tangerang : Empat Pena Publishing, 2014
(xliv + 320 hlm; 14 x 21 cm)
ISBN 978-602-17908-5-4

Kata Sambutan

Oleh: Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.
Rektor Universitas Budi Luhur

MASALAH perempuan kini telah memperoleh perhatian yang cukup besar dari berbagai komunitas di seluruh dunia. Hal itu muncul karena adanya kesadaran mengenai nasib dan kondisi perempuan yang selama ini tertindas serta mengalami perlakuan yang kurang adil oleh hegemoni sistem patriarki. Padahal dalam sistem patriarki yang berlaku di hampir seluruh masyarakat telah menganggap sebuah asumsi bahwa kodrat seorang perempuan itu lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, dan mereka juga harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki demi tercapainya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis.

Pada era tahun 1990-an, kajian mengenai perempuan dan feminisme semakin merebak khususnya di Indonesia. Ini terbukti misalnya pada saat digelar beberapa seminar yang mengambil tema tentang perempuan hampir dapat dipastikan akan memperoleh perhatian yang

luar biasa. Tampaknya mereka tidak sekedar punya *concern* terhadap isu-isu perempuan, tapi juga mulai mengibarkan bendera gerakan perempuan, meski baru merupakan sinyal-sinyal awal. Munculnya fenomena ini antara lain disebabkan oleh adanya praktek-praktek antiemansipasi perempuan dalam masyarakat. Bahkan secara ideologis masih berkembang asumsi bahwa perempuan itu hanyalah berfungsi sebagai *konco wingking* (teman belakang). Seolah seorang perempuan itu urusannya hanya mengetahui masalah-masalah dapur (memasak), kasur (tempat tidur), dan sumur (mencuci). Sebagai akibatnya, banyak di antara mereka—untuk tidak mengatakan hampir semuanya—kurang berperan di sektor-sektor publik.

Kondisi masyarakat yang kurang menghargai perempuan pada gilirannya melahirkan sebuah kesadaran baru *(new consciousness)* akan perlunya reformasi pola relasi antara laki-laki dan perempuan ke arah yang lebih adil dan setara *(equality)*. Muncul kemudian gerakan feminisme yang dilandasi oleh semangat untuk memperjuangkan keadilan, persamaan dan kebebasan. Inti dari gerakan feminisme adalah kesadaran terhadap adanya diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan, dilanjutkan dengan sebuah upaya untuk mengubah keadaan tersebut menuju ke suatu sistem masyarakat yang lebih adil. Untuk menjadi feminis tidak harus berjenis kelamin perempuan. Seorang laki-laki pun dapat menjadi seorang feminis, asal memiliki *concern* dan kesadaran untuk mengubah ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, perhatian utama dari gerakan feminisme adalah terciptanya suatu *justice* (keadilan) dan *equality* (kesetaraan) dalam sistem dan struktur masyarakat.

Dalam pengertian yang lebih luas, feminisme dapat mencakup beberapa pengertian. *Pertama,* feminisme merupakan pengalaman hidup, sebab feminisme tidak terlepas dari sejarah kemunculannya, yaitu masyarakat patriarki. Dari sejarah hidup inilah kemudian lahir kaum perempuan yang memiliki kesadaran feminis. *Kedua,* feminisme sebagai alat perjuangan politik bagi pembebasan manusia. Berangkat

dari kesadaran feminisme ini, perempuan ingin melepaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan yang selama ini dialaminya. Perjuangannya itu diletakkan dalam bentuk persamaan hukum *(legal status)* hak memilih dan kesetaraan dengan laki-laki. Gerakan ini kemudian disebut sebagai *liberation movement,* yaitu suatu gerakan pembebasan yang pada intinya menuntut persamaan dalam struktur sosial politik. *Ketiga,* feminisme sebagai aktivitas intelektual. Artinya, gerakan yang memberikan pemahaman tentang kehidupan sosial, di mana perempuan itu tinggal, kekuatan apa yang dapat dilaksanakan untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan nasib perempuan dan untuk mengetahui apa yang harus diperjuangkan, bagaimana mendefinisikan bentuk penindasan atas perempuan, dan lain sebagainya.

Saya menyambut gembira hasil penelitian Dr. Umaimah Wahid, M.Si. yang tertuang dalam buku ini, *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*. Dalam konteks pergulatan politik kaum perempuan di Indonesia, kehadiran buku ini akan sangat bermanfaat karena menyoroti peran media massa, yang menurut penulis buku ini perlu dijadikan sebagai instrumen pendukung. Terlepas apakah media berpihak atau tidak terhadap perjuangan politik kaum perempuan, analisis mengenai konstruksi teks media yang dipaparkan dalam buku ini dapat membantu kaum perempuan dalam memahami dinamika komunikasi politik di tengah serbuan arus informasi (media massa) yang semakin sulit dibendung. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya untuk mengatakan bahwa buku ini adalah semacam 'pengingat' bagi kaum perempuan yang sedang bergulat di arena politik, betapa media massa dapat berperan penting sebagai instrumen pendukung. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas buah karyanya ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan kaum perempuan dan kita semua. ■

Jakarta, 15 Maret 2014

Kata Pengantar

Oleh: Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik
Universitas Indonesia

SEBAGAI kegiatan personal maupun komunal yang bertujuan memperoleh kekuasaan, politik meniscayakan membuka sebanyak mungkin akses ke satu tujuan, kekuasaan. Upaya membuka jalan menuju kekuasaan ini harus dikomunikasikan dengan sebanyak mungkin pihak. Hal yang sama juga menjadi penting untuk dilakukan oleh perjuangan politik perempuan.

Dalam konstelasi politik yang terlanjur didominasi oleh budaya patriarki, tentu akan lebih banyak tantangan yang harus ditempuh. Karenanya, gerakan perjuangan politik perempuan harus menggunakan strategi komunikasi politik yang lebih kreatif dalam jumlah yang massal dan berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui media.

Sebagai sarana komunikasi yang bisa menjangkau secara luas, media massa, jejaring sosial, dan sosial media menjadi beberapa instrumen

yang dapat dipilih. Hanya saja perlu diingat, media massa komersial memiliki ideologinya sendiri. Dalam analisis ekonomi politik media, ideologi sebuah media massa komersial tidak serta merta ditentukan dalam *newsroom* semata, melainkan bergantung pada kekuatan modal dan paradigma politik dari orang tak terlihat yang terdapat di balik layar.

Alhasil, selera media massa komersial didominasi oleh selera sosok di balik layar ini. Namun demikian, aspek pasar merupakan variabel terpenting bagi media massa yang bersifat komersial. Nah boleh jadi dengan pertimbangan inilah penulis memilih berdamai dengan media sebagai apa yang disebutnya langkah cerdas menyikapi keadaan.

Hanya saja penting untuk dicatat bahwa peran media yang begitu kuat dalam memengaruhi masyarakat harus dikawal. Pasalnya, media massa sebagai gelombang besar arus informasi saat ini menjadi tak terbendung terlebih dengan perkembangan teknologi yang menyertainya sebagai instrumen penting.

Sebagaimana dikutip penulis buku ini dari Marsha Jones dan Emma Johnes: "...masyarakat belajar tentang persoalan-persoalan lokal, nasional, dan internasional dari surat kabar, radio, televisi dan secara signifikan masyarakat percaya dengan apa yang dilihat, dibaca dan didengar dari media..." Ini sekaligus menjelaskan betapa kerja media menjadi demikian penting dalam membangun persepsi masyarakat terhadap suatu hal, termasuk persepsi mereka terkait perempuan dan keterlibatan mereka dalam aktivitas politik.

Mengingat demikian besarnya kekuatan media dalam memengaruhi persepsi masyarakat maka kaum perempuan dalam aksi politiknya tidak bisa tidak harus masuk ke dalam pemberitaan media dengan citra tertentu yang dipersiapkan sedemikian rupa. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka memengaruhi persepsi masyarakat tentang kepantasan dan kelayakan perempuan untuk bergiat di arena politik dan tidak melulu berurusan dengan urusan domestik.

Penting diperhatikan adalah konstruksi identitas dan citra sebagai bagian dari komunikasi politik terhadap dua pihak, yakni kaum patriarki dan masyarakat sebagai calon konstituen. Mengenai kaum patriarki sebagai pihak yang terlanjur mendominasi ranah politik, upaya mengonstruksi citra perempuan dan politik di media sangatlah penting.

Politisi perempuan, dalam kaitannya dengan dominasi patriarki, harus membangun citra mereka bukan sebagai manusia kelas dua yang hanya sanggup berurusan dengan urusan domestik. Berbagai strategi harus dilakukan sebagai cara berkomunikasi dengan dominasi patriarki untuk mengatakan bahwa kaum perempuan juga memiliki kelayakan dan kemampuan sebagaimana para laki-laki yang berpolitik. Demikian pula halnya dengan menghadapi masyarakat sebagai calon konstituen, jika pola komunikasi terhadap dominasi patriarki ditujukan sebagai upaya *counter hegemony*, maka terhadap calon konstituen yang lebih ditekankan adalah aspek edukasi, yaitu upaya memberikan penyadaran pada masyarakat yang hidup dalam kepungan cara pandang patriarki yang bias gender.

Meskipun tampak seolah berbeda, hakikatnya kedua hal tersebut merupakan satu aksi menjawab satu permasalahan yang sama di dua lapisan berbeda, yakni aksi *counter hegemony* atas hegemoni wacana tentang perempuan yang dikonstruksi logika patriarki dan menjadi nilai yang diyakini masyarakat.

Buku ini memberi gambaran bagaimana perjuangan politik perempuan, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kerja media dalam mengonstruksi citra perempuan di satu sisi, yang pada gilirannya membangun persepsi masyarakat di sisi lain. Penulisnya mengamati dari sejumlah pemberitaan surat kabar dan melihat bagaimana realitas perempuan dikonstruksi dan di*framing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan pandangan tertentu di benak masyarakat. Demikianlah pola kerja media yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita sebagai pembaca surat kabar namun kerap luput dari pengamatan. ■

Kata Pengantar

"Perempuan sebagai Komunikator Politik"
Oleh: Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D.
Guru Besar dan Dekan Fikom Unpad

LAKI-LAKI dan perempuan itu setara, meskipun tidak sama. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun laki-laki sering kali mendiskriminasi perempuan, terkadang atas nama agama. Padahal dalam ajaran Islam misalnya, tak ada satu teks suci pun, baik dalam Alquran maupun hadis, yang menyatakan bahwa perempuan itu boleh direndahkan oleh laki-laki. Malah sebaliknya, perempuan harus dimuliakan oleh laki-laki.

Dalam sejarah Islam, seorang perempuan bernama Aisyah, selain sebagai istri Rasulullah yang gemar menuntut ilmu, makanya banyak hadis yang diriwayatkannya, juga sebagai panglima perang seusai Rasulullah wafat. Fakta ini secara simbolik memberikan pesan bahwa hingga derajat tertentu partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan itu dibolehkan, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, militer,

dan juga politik. Keikutsertaan politisi perempuan, sepanjang mampu menjaga *marwah*-nya dalam berinteraksi dengan politisi lelaki, diperlukan untuk mengupayakan kepentingan perempuan. Jika ada makhluk yang paling mampu berempati dengan perempuan, maka makhluk itu adalah perempuan sendiri yang secara biologis dan psikologis memiliki kesamaan, apakah itu saat melahirkan atau ketika menginginkan kesejahteraan dalam diri dan keluarganya.

Dalam sejarah dunia kita mengenal perempuan-perempuan yang menjadi kepala negara seperti Ratu Bilqis dan Cleopatra. Pada abad ke-20 dan ke-21 kita mengenal Elizabeth II sebagai Ratu Kerajaan Inggris, Golda Meir sebagai Perdana Menteri Israel, Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina, Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman, dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Salah satu pemimpin pemerintahan yang kuat dan berkuasa adalah Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang berkuasa dari 1979 hingga 1990. Lewat cara berbicara, busana yang dikenakan, rambut, *make-up*, dan sebagainya, Thatcher mencitrakan dirinya sebagai perempuan berani, tegar, dan berkuasa. Tahun 1983, pemerintahan konservatif yang baru saja memenangkan Perang Falkland, menampilkan pemimpinnya, Margaret Thatcher, sebagai Wanita Besi (*Iron Lady*), melawan kampanye politik Partai Buruh yang dipimpin Michael Foot.

Dalam politik internasional, sikap meremehkan politisi perempuan itu tidak jarang kita temukan. Laffin (dalam Mulyana, 2013: 37-38) menelaah faktor-faktor yang mendorong para pemimpin Argentina menginvasi kepulauan Falkland milik Inggris tahun 1982. Saat itu mereka mempunyai miskalkulasi yang cenderung *sexies*. Kaum laki-laki Argentina, dari presiden hingga anak sekolah, adalah korban-korban *machismo*. Ketika Margaret Thatcher memimpin Partai Konservatif dan lalu menjadi Perdana Menteri, para jenderal Argentina beranggapan bahwa Thatcher merupakan hasil kompromi di antara kelompok-kelompok laki-laki kuat dengan pengikut seimbang. Oleh karena itu, ada asumsi Thatcher akan dikuasai oleh kaum laki-laki

yang memosisikannya sebagai pemimpin. Pada saat itu, Junta Galtieri beralasan bahwa tak ada perempuan yang menghendaki perang; lebih jauh, tak ada perempuan yang secara politis mampu memimpin perang. Terbiasa merendahkan dan mendominasi kaum perempuan dalam masyarakat mereka sendiri, para pemimpin Argentina yakin bahwa Thatcher adalah penyambung lemah pemerintahan Inggris. Inggris pun menghadapi invasi Argentina dan memenangkan perang.

Kini, meskipun perempuan semakin maju dalam berbagai bidang kehidupan, stereotip mengenai perempuan sebagai makhluk yang lemah dan emosional masih cukup kental dalam pandangan kaum laki-laki, apalagi di Indonesia yang sebagian besar penduduk laki-lakinya masih menganut sistem patriarki. Padahal secara fisik perempuan lebih mampu menahan rasa sakit daripada laki-laki. Juga diketahui, perempuan lebih mampu bertahan hidup setelah ditinggal mati oleh pasangan hidupnya, daripada sebaliknya.

Stereotip bahwa perempuan itu lemah boleh jadi dianut sebagian kaum perempuan juga, *dus* menjadi otostereotip. Pada gilirannya otostereotip ini boleh jadi akan menghasilkan "nubuat yang dipenuhi sendiri" (*self-fulfilling prophecy*), yaitu ramalan yang berbuah kenyataan karena baik disadari ataupun tidak, kita percaya dan mengatakan bahwa ramalan itu akan menjadi kenyataan (Verderber, 1996: 36). Jika perempuan percaya bahwa dirinya lemah, ia akan menjadi lemah, karena diperlakukan sebagai makhluk lemah oleh kaum laki-laki, berdasarkan persepsi laki-laki atas perilaku verbal dan nonverbal perempuan yang ditafsirkan bahwa diri perempuan itu lemah. Pada gilirannya, persepsi laki-laki tersebut dicerap lagi oleh perempuan dan menjadi bagian dari konsep dirinya. Karena itu, fenomena ini seperti lingkaran setan.

Penafsiran bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dapat dilihat dari karakteristik bahasa verbalnya, misalnya: penggunaan ekor tanya (*tag question*), seperti "*Kita jadi pergi, kan?*" ketimbang "*Kita jadi pergi?*"; penggunaan kata-kata penguat (*intensifier*) seperti *begitu,*

sangat, *sekali*, seperti dalam kalimat "Masalah ini *sanga*t berat."; penggunaan kata/frasa yang melemahkan seperti *tampaknya, agaknya, kalau saya tidak salah*, dan lain sebagainya, seperti dalam kalimat "*Kalau saya tidak salah*, masalah tersebut sudah kita bicarakan."; tata bahasa dan ucapan yang hiperkorek (resmi); frasa yang sangat sopan; dan lain sebagainya (lihat Lakoff, 1975). Sementara itu, melihat perilaku nonverbalnya, perempuan pun sering dianggap lemah, seperti saat perempuan menundukkan pandangan mata, memiringkan kepala, menunjukkan postur yang kaku, dan mengalah kepada invasi ruang yang dilakukan laki-laki, merendahkan suaranya, dan memakai busana yang warna dan modelnya dimaksudkan untuk menarik perhatian laki-laki (lihat Mulyana, 1999: 22-27).

Hingga kapan pun, "kelemahan" perempuan ini takkan berubah, selama hal itu dikonstruksi sedemikian rupa oleh kaum laki-laki dan oleh kaum perempuan sendiri. Dalam berbagai bidang kehidupan, lingkaran setan itu harus diputuskan dengan melakukan berbagai upaya perbaikan. Di negara kita, dalam ranah politik, salah satu upaya perbaikan itu adalah lewat *affirmative action* berupa kuota perempuan di parlemen sebanyak 30 persen. Kaum perempuan tidak perlu menganggap hal ini sebagai hadiah dari kaum laki-laki, melainkan sebagai peluang yang harus dimanfaatkan demi perbaikan nasib mereka. Hanya saja, perempuan harus bekerja lebih keras untuk memperjuangkan kaumnya secara keseluruhan. Mereka harus menunjukkan kredibilitas mereka sebagai anggota parlemen. Mereka harus berpenampilan, termasuk cara berbusana, secara lebih hati-hati, untuk tidak direndahkan oleh lawan jenisnya. Mereka harus berbicara dengan cara yang berbeda dengan cara yang selama ini dianggap sebagai perempuan yang lemah, misalnya dengan menghindari ekor tanya, kata atau frasa yang melemahkan, ungkapan yang terlalu sopan, dan bahasa tubuh serta pernak-pernik yang dianggap sekadar untuk menarik perhatian laki-laki. Terpenting, mereka harus mampu menjaga integritas mereka. Semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam kasus korupsi di berbagai lembaga di negeri kita, seperti Angelina Sondakh, Ratu Atut Chosiyah,

Mindo Rosalina Manullang, dan Miranda Gultom, akan semakin membuat kaum perempuan terkendala untuk berkiprah di dunia yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, terutama di dunia politik.

Dengan hadirnya lebih banyak perempuan dalam ranah politik, ranah politik di Indonesia akan lebih *androgynous*, yakni sifat pertengahan antara sifat maskulin dan sifat feminin. Manusia yang sehat bukanlah manusia yang secara mutlak maskulin atau secara mutlak feminin, namun sekaligus memiliki kedua sifat itu, meskipun masing-masing memiliki tubuh yang unik secara fisik dan biologis.

Kini dan di masa mendatang, politisi perempuan di negara kita masih akan berhadapan dengan berbagai kendala, bukan saja dari lawan jenis mereka yang boleh jadi meremehkan mereka, namun juga dari media massa dan masyarakat yang masih menganggap bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Jangankan di negara-negara berkembang, di negara-negara maju pun, bahkan di Amerika yang sejarah demokrasinya lebih dari 200 tahun, dunia politik masih didominasi oleh laki-laki. Dengan adanya kuota 30 persen perempuan di parlemen, terlepas dari tercapai atau tidak, dan dengan fakta bahwa di Indonesia pernah ada seorang presiden perempuan, sementara di Amerika tidak ada pernah ada, dari segi politik perempuan Indonesia lebih "maju" daripada perempuan Amerika.

Dengan semakin banyaknya perempuan yang aktif dalam bidang politik di Indonesia, semakin banyak pula tema yang dapat diteliti. Mengenai politisi perempuan yang berkiprah di DPR saja misalnya, sejumlah pertanyaan penelitian layak diajukan berdasarkan berbagai perspektif teoretis:

- Sejauh mana kepedulian politisi perempuan untuk memperjuangkan kaumnya?
- Bagaimana politisi laki-laki dan politisi perempuan mengonstruksi politisi perempuan yang tangguh?

- Apa karakteristik bahasa verbal yang digunakan oleh politisi perempuan dan perbedaannya dengan karakterisitik bahasa verbal politisi laki-laki?
- Bagaimana persepsi politisi laki-laki terhadap berbagai macam bahasa tubuh dan pesan nonverbal lainnya yang ditampilkan politisi perempuan, begitu juga sebaliknya?
- Taktik-taktik komunikasi apa sajakah yang digunakan politisi laki-laki untuk meremehkan politisi perempuan?
- Bagaimana politisi perempuan melakukan presentasi diri (panggung depan) saat berhadapan dengan khalayak dibandingkan dengan laki-laki dan bagaimana pula panggung belakang mereka?
- Adakah bias gender dalam pemberitaan aktivitas politisi perempuan dibandingkan dengan aktivitas politisi laki-laki di televisi? (Bagaimana televisi membingkai kiprah politisi perempuan dibandingkan dengan politisi laki-laki?)
- Adakah hubungan antara tingkat pendidikan perempuan dan kemelekan politik mereka?

Buku yang ditulis Dr. Umaimah Wahid M.Si. ini merupakan salah satu studi yang menarik tentang kiprah perempuan di dunia politik yang didominasi laki-laki. Buku ini perlu kita apresiasi, mengingat langkanya buku semacam ini. Studinya berupaya bukan saja untuk memotret perjuangan perempuan dalam bidang politik, namun juga menggugat dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam ranah tersebut.

Semoga buku ini dapat memberi inspirasi kepada kaum laki-laki untuk lebih memberdayakan kaum perempuan sebagai mitra dalam bidang politik, sekaligus juga memberikan motivasi kepada kaum perempuan untuk terus berjuang dalam ranah politik demi perbaikan nasib kaum perempuan di Indonesia.

Selamat membaca.

Referensi

Lakoff, Robin. 1975. *Language and Women's Place*. New York: Harper & Row.

Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi*. Bandung: Rosda.

__________. 2013. *Komunikasi Politik dan Politik Komunikasi*. Bandung: Rosda.

Verderber, Rudolp F. 1996. *Communicate!* Belmont: Wadsworth.

Kata Pengantar

Oleh: Dr. Marwah Daud Ibrahim, M.A.
Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

SENANG atau tidak, realitas saat ini adalah kita hidup dan bernafas di lingkungan yang didominasi alam pikiran patriarki. Konsekuensi logisnya adalah standar kelayakan di dalam tatanan sosial ditentukan oleh cara pandang yang masih bias gender. Konstruksi budaya pun menjadi dominasi cara pandang ini. Dalam keseharian, di sekitar kita saja misalnya, cara pandang patriarki yang bias gender ini masih kerap muncul. Bahkan tak jarang pula muncul dari kepala seorang manusia berjenis kelamin perempuan.

Kenyataan semacam ini merupakan hal penting untuk dicatat bahwa kerja melawan hegemoni patriarki bukan agenda perempuan menaklukkan laki-laki. Namun lebih jauh dari itu, merupakan upaya penyadaran tentang kesetaraan gender yang juga perlu ditanamkan di kepala perempuan yang terlanjur berpikir secara patriarki.

Sebuah contoh sederhana akan mudah kita dapat tentang paradigma bias gender. Di masyarakat kita umumnya, perempuan masih ditempatkan di wilayah domestik, seolah ada semacam kesepakatan sosial berdasar nilai kepantasan tertentu yang mengatur bahwa manusia bernama perempuan adalah manusia dengan aktivitas melingkupi dapur, kasur, dan sumur saja.

Cara pandang ini tidak datang begitu saja secara tiba-tiba, melainkan memiliki dasar ideologis. Boleh jadi kita pernah mendengar pembagian antara yang publik dan yang privat. Cara pandang bias gender menafsirkan bahwa yang publik adalah domain para pria di mana mereka melakukan serangkaian aktivitas termasuk aktivitas politik yang pada gilirannya menghasilkan kebijakan yang menetukan aturan-aturan dan nasib sosial politik masyarakat, termasuk perempuan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan yang privat ditafsirkan sebagai ranah domestik di mana perempuan menjalankan kesibukan hariannya dan menitipkan nasib mereka pada laki-laki.

Keadaan semacam ini menempatkan perempuan sebagai objek pasif yang cukup menunggu saja di rumah dan menerima apa pun kebijakan yang dihasilkan oleh akal pikiran patriarki di luar sana. Dalam posisi ini, perempuan disubordinatkan. Mengutip Simone de Beauvoir, penulis buku ini menegaskan bahwa perempuan kerap diposisikan sebagai manusia kelas dua, *the second sex*. Sebagai manusia kelas dua, akibatnya perempuan tidak memiliki keleluasaan sebagaimana para lelaki yang bisa dengan bebas beraktivitas di ruang publik semisal berpolitik. Sejarah panjang zaman klasik menunjukkan kepada kita betapa negara adalah ruang publik—dalam artian ruangnya para senator. Para senator yang dimaksud adalah kaum laki-laki. Sedangkan para wanita dianggap tabu masuk dalam domain ini.

Waktu terus bergulir dan zaman berganti, era baru dengan paradigma demokrasi membawa semangat baru yang memberi kemungkinan bagi para wanita untuk ambil bagian di ruang publik. Namun demikian, bukan serta merta berarti bahwa demokrasi menjamin kesetaraan

bagi perempuan. Justru perempuan harus menaruh kejelian mengingat residu cara pandang patriarki masih lagi bersisa di dalamnya.

Meskipun zaman berubah dan ruang publik menjadi terbuka dan tidak lagi tabu bagi keikutsertaan perempuan, namun harus diingat bahwa fakta di lapangan demokrasi masih dimaknai dalam interpretasi patriarki. Ini dapat dilihat dengan sangat mudah melalui klausul-klausul dalam teks politik maupun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan parlemen yang masih didominasi alam pikiran patriarki. Demikian juga halnya dengan partai yang masih didominasi kultur patriarki.

Alhasil, salah satu tugas berat sekaligus agenda besar dari perjuangan politik perempuan adalah sebuah ikhtiar membaca ulang demokrasi. Kaum perempuan harus mengoreksi ulang demokrasi yang ada saat ini, sebab dalam teori dan praksisnya demokrasi saat ini tak lepas dari tafsiran akal patriarki. Kultur patriarki yang telah menyejarah tertanam dan berkelindan dalam struktur sosial merupakan instrumen penting yang turut mengonstruksi pemahaman seputar demokrasi. Menyikapi kondisi semacam ini, penulis buku ini menekankan bahwa "…kaum perempuan harus memiliki kesadaran kritis dan menempatkan kondisi tersebut sebagai masalah bersama yang harus dihilangkan..."

Sejatinya ini merupakan tugas besar yang harus diemban kaum perempuan dengan seperangkat strategi dan tahapan tertentu, baik dimulai dari pembenahan internal kaum perempuan maupun perlawanan hegemoni di luar. Secara sinergis, hal tersebut dapat dilakukan dengan aktivisme kaum perempuan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Dalam ranah politik, penulis buku ini meilihat bahwa cara terbaik yang paling mungkin dilakukan adalah *struggle from within.* Artinya, perjuangan politik perempuan dilakukan dengan cara masuk ke dalam struktur. Perempuan sebagai agen, masuk ke dalam struktur politik di mana mereka berdialektika dengan struktur dan instrumen yang ada di dalamnya dan menghasilkan dua kemungkinan. *Pertama,* kaum perempuan sebagai agen gagal mengubah struktur dan larut di

dalamnya atau boleh jadi keluar dari arena. *Kedua*, kaum perempuan sebagai agen berhasil menghadapi hegemoni struktur dan mengubahnya menjadi struktur yang baru dengan nilai-nilai yang dibawa agen.

Perjuangan dari dalam ini mendapat pintu masuknya yang agak lebar dengan ketentuan kuota tiga puluh persen bagi keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik untuk sampai ke parlemen. Namun demikian, penulis buku ini mengingatkan "...kouta 30 persen dipilih sebagai langkah strategis sementara…" Hal ini menjadi penting untuk diingat, sebab perjuangan politik perempuan tidak selesai dengan menduduki kursi parlemen.

Lebih jauh dari itu adalah kerja besar membenahi paradigma perempuan yang masih banyak berpikir dan mengafirmasi cara pandang patriarki. Terutama penting bagi perempuan yang akan duduk di parlemen sebagai perwakilan kaumnya terkait perjuangan mereka melakukan *counter hegemony* atas diskursus yang diperdebatkan dalam proses legislasi untuk menghasilkan kebijakan tertentu yang memiliki dampak bagi kaum perempuan baik secara langsung atau tidak.

Terkait pembangunan paradigma dan persepsi publik tentang perempuan, media (dalam hal ini surat kabar) sebagai instrumen penting demokrasi juga memainkan peran sangat penting. Kerja media massa cetak yang begitu massif dan berkesinambungan mampu menggiring opini publik ke arah tertentu yang diinginkan kepentingan media terkait. Bahkan, fakta yang dikemas sedemikian rupa dalam media, dengan *framing* dan pilihan diksi tertentu juga memiliki pengaruh besar untuk mengonstruksi realitas di dalam pikiran publik pembaca.

Dalam kaitannya dengan citra perempuan dan politik, peran media juga teramat penting. Perempuan kerap kali dicitrakan hanya berurusan dengan perkara busana dan kuliner ataupun hal semacam itu. Rubrik yang ditujukan bagi perempuan biasa tak jauh dari hal tersebut. Perjuangan politik perempuan juga harus mengamati hal ini sebab apa yang disabdakan media, sadar atau tidak, diafirmasi bawah sadar pembaca dan mengendapkan persepsi tertentu tentang perempuan.

Perjuangan politik perempuan juga harus mengambil ruang di media berkenaan dengan aktivisme mereka dan citra perempuan terkait kecerdasan serta kelayakan mereka untuk terlibat di ranah politik. Upaya ini merupakan cara bernegosiasi untuk melawan hegemoni tentang persepsi perempuan yang didomestifikasi sekian lama. Melalui media, perjuangan politik perempuan menjadi efektif untuk disuarakan secara massif dan berkesinambungan. Media, dalam hal ini harus dijadikan mitra sekaligus dikawal agar muatan yang disuarakannya tidak mendiskreditkan perempuan. Ini menjadi penting untuk menjaga pemberitaan media yang mengarah pada afirmasi publik tentang gerakan perempuan di ranah politik.

Kendati demikian, saya pikir kaum perempuan dengan aktivisme dan kritisismenya juga patut menaruh kehati-hatian akan hal kuota tiga puluh persen ini. Kaum perempuan yang memutuskan terjun ke arena politik harus lebih jeli menyikapi kuota tiga puluh persen ini dalam cara pandang yang jernih. Kaum perempuan harus berani bertanya-tanya apakah kuota tiga puluh persen ini benar-benar jembatan emas bagi perjuangan politik perempuan.

Dalam kalkulasi politik di Indonesia, perempuan adalah sumber suara terbanyak berdasarkan pada rasio jumlah perempuan yang lebih banyak ketimbang pria. Bagi partai politik, perempuan sebagai sumber suara menjadi demikian penting. Karenanya, partai politik mulai melirik perempuan sebagai instrumen penting dalam kontestasi politik yang akan menentukan perolehan suara.

Dalam kaitannya dengan kuota tiga puluh persen, politisi perempuan yang terlibat masuk ke dalam partai tertentu harus menganalisis dengan jeli apakah keterlibatan mereka dalam politik melalui partai menempatkan mereka sebagai representasi perempuan atau politisi perempuan diberi ruang hanya sebagai *vote gather* bagi para calon pemilih yang mayoritas perempuan. Dengan bahasa politik sentimentil "perempuan pilih perempuan", tentunya politisi perempuan akan memainkan peran penting sebagai pendulang suara bagi kemenangan

partai terkait di parlemen dan menentukan posisi tawar partai dalam konstelasi politik lebih luas.

Alhasil, keadaan yang apa mau dikata kurang menguntungkan bagi perempuan ini, membuat para aktivis maupun politisi perempuan harus melihat lebih jeli lagi agar keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar menjadi variabel komplemen. Politisi perempuan harus benar-benar memastikan keterlibatan mereka sebagai variabel penentu dan bukan sekadar pelengkap sarat administratif terlebih lagi komoditas politik sebagai *vote gather* yang menguntungkan kepentingan politik yang terlanjur dikuasai kepentingan patriarki. ■

Jakarta, Maret 2014

Kata Pengantar

Oleh: Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI

DALAM tataran konsep, persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam politik di Indonesia adalah diskusi yang sudah final. Tidak ada perbedaan pandangan yang signifikan dalam soal itu. Persoalannya, antara konsep dan kenyataan masih sangat timpang. Dengan melihat data perempuan atau lebih konkretnya perempuan yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, jabatan penting di pemerintahan maupun institusi politik lainnya, antara jumlah laki-laki dan perempuan masih sangat timpang. Bagi kaum feminis, kondisi demikian adalah area perjuangan, yaitu perjuangan ekistensi dan persamaan hak.

Buku ini nampaknya terinspirasi oleh ide perjuangan itu. Dengan gaya penulisan yang penuh semangat dan didukung pendekatan konsep ilmiah yang mumpuni, buku yang semula disertasi ini menyajikan

informasi yang sangat penting mengenai perjuangan persamaan hak politik. Dalam realitas politik di Indonesia, hegemoni laki-laki atas perempuan–di mana dunia politik adalah dunia laki-laki–adalah suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari. Di samping menguraikan berbagai aspek perempuan dan politik di Indonesia, buku ini memberi solusi dan strategi yang harus dipergunakan untuk menyukseskan perjuangan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam politik. Dengan menggunakan teori *hegemony–counter hegemony,* yaitu gerakan masyarakat sipil versus masyarakat politik dari Antonio Gramsci, perjuangan perempuan harus total dan merupakan perjuangan besama oleh masyrakat sipil melalui berbagai cara dan media sehingga melahirkan kebijakan negara yang menjamin peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan, termasuk peluang dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu ada ideologi perjuangan yang jelas untuk mencapai keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam politik.

Selain membahas perempuan dan politik, buku ini juga mengupas tuntas berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik, seperti media massa, pandangan partai politik, sikap pemerintah/negara dan faktor internal perempuan, terutama yang bersumber dari kajian berita media massa. Agak sedikit berbeda dengan banyak kajian mengenai perempuan dan politik sebelumnya yang lebih fokus pada persoalan hambatan partisipasi perempuan dalam politik, buku ini langsung menukik pada aspek kebijakan negara, yaitu gerakan *affirmative action* sebagai salah satu kebijakan penting untuk mengakselerasi persamaan hak tersebut. Pencapaian dalam kebijakan legislasi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR, DPRD dan pimpinan partai politik, oleh penulis buku ini dicatat sebagai buah perjuangan bersama atau *collective will* kaum perempuan, meskipun harus diakui masih dalam tahap awal perjuangan.

Memang harus diakui hasil kebijakan itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Terbukti keterwakilan perempuan di lembaga

perwakilan (DPR-RI) pada hasil Pemilu tahun 2009 masih 11% (setelah kebijakan *affirmative action* 30%). Walaupun terdapat peningkatan dari hasil pemilu 1999, yaitu 9%, namun masih lebih rendah dari periode Orde Baru yang pernah mencapai 12,5% (pemilu 1992). Demikian juga dengan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di Komisi Pemilihan Umum yang menentukan minimal 30% keterwakilan perempuan, belum menunjukkan hasil yang siginifikan.

Persoalannya, mengapa setelah adanya kebijakan *affirmative* jumlah perempuan di DPR dan keanggotaan KPU tidak berubah secara siginifikan? Paling tidak, hal itu disebabkan oleh tiga persoalan pokok. P*ertama*, rumusan yang tercantum dalam undang-undang tidak bersifat *mandatory* atau wajib, tetapi memungkinkan untuk dihindari karena menggunakan frasa "dengan memperhatikan" sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Frasa "dengan memperhatikan" itu dapat dimaknai tidak wajib. Frasa tersebut pernah di*judicial review* untuk dihapuskan di Mahkamah Konstitusi, tetapi ditolak karena berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan dari faktor kapasitas, kapabilitas serta akseptabilitas dari rakyat (lihat Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 [23 Desember 2008] dan Putusan MK Nomor 74/PUU-XI/2013). *Kedua*, keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR, menjadi tidak begitu siginifikan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perempuan di DPR, karena dengan sistem pemilu daftar terbuka dengan suara terbanyak, perempuan harus bersaing bebas dengan calon legislatif laki-laki untuk bisa terpilih. Dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki, calon legislatif perempuan akan kembali kalah dalam pertarungan bebas seperti itu. *Ketiga*, faktor sumber daya dan jumlah perempuan yang berminat dalam politik tidaklah terlalu banyak sehingga jumlah minimum 30% keterwakilan perempuan tidak mudah untuk dipenuhi. Bagi partai politik, banyak yang mengajukan calon legislatif perempuan hanya sekedar untuk memenuhi kuota jumlah minimal keter-

wakilan perempuan sebagaimana ditentukan undang-undang, tetapi tidak memenuhi kualitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.

Karena jumlah perempuan yang berminat dalam politik tidak terlalu banyak sebagaimana halnya laki-laki, perlu direnungkan kritik atas pendekatan perjuangan feminis yang fokus pada pendekatan esensialisme, yang melihat perempuan secara homogen versus hegemoni patriarki dalam kehidupan politik. Bentuk aksi pendekatan esensialisme adalah perjuangan mencapai perlakuan setara dengan pendekatan perlakuan khusus (*affirmative action*). Kaum feminis mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan lain bagi perjuangan perempuan dalam politik, yang dikenal dengan pendekatan antiesensialisme, suatu pendekatan yang tidak melihat perempuan secara homogen, tetapi melihatnya secara *difference* ("yang lain") atau berbeda, yaitu dengan melihat perempuan yang plural dengan bermacam minat serta lingkungan dan kondisi sosial budaya yang melingkupinya sehingga dapat dirumuskan bentuk partisipasi politik perempuan sesuai minat dan kondisi yang dihadapinya. Oleh karena itu, masih banyak aspek dan cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dengan ragam pilihan aktivitas politik yang tepat. Temuan menarik yang patut dibaca dari hasil penelitian AD Kusumaningtyas (Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, 2008: 370) yang menyimpulkan bahwa ternyata begitu kompleksnya pengalaman perempuan yang menggeluti dunia politik formal di Indonesia, mulai dari hambatan budaya yang memandang bahwa urusan perempuan adalah urusan privat, sampai pada hambatan keluarga dan suami. Hanya mereka yang karena keluarga dan suaminya berpandangan terbuka membiarkan istrinya aktif dalam dunia politik formal, atau karena bersama suami dalam aktivitas partai, para perempuan dapat terjun dalam dunia politik formal.

Saya menyambut gembira hasil kerja keras Dr. Umaimah Wahid melalui penelitian untuk disertasi yang sangat mendalam dan hasilnya telah dipertahankan di hadapan para penguji di Universitas Indonesia.

Disertasi itulah yang kemudian diterbitkan menjadi buku yang sangat bernilai ini. Sekali lagi, kajian komprehensip dalam buku ini dapat memberi inspirasi kepada para pembaca mengenai strategi dan langkah perjuangan kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam politik di Indonesia, termasuk peluang dalam era otonomi daerah. ■

Jakarta, Maret 2014

Pengantar Penulis

DISKUSI mengenai perempuan dan politik muncul sebagai isu yang menarik terutama menjelang pemilu legislatif. Isu keterlibatan perempuan menjadi mencuat berkaitan dengan kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik. Isu global yang mulai diperjuangkan oleh jaringan perempuan pemerhati hak-hak politik perempuan di Indonesia mulai tahun 1999 dan momentum keberhasilan dengan lahirnya UU Partai Politik Nomor 32 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1. Namun pada realitasnya, adanya kebijakan *affirmative action* bukan berarti proses keterwakilan perempuan menjadi selesai. Beragam persoalan baru yang merupakan implikasi dari persoalan-persoalan yang melingkupi perempuan muncul dan seakan melemahkan kesempatan yang ada.

Affirmative action kuota 30 persen sebagai sebuah kebijakan juga tidak diterima oleh semua pihak dan golongan, penolakan muncul baik dari partai politik, organisasi atau bahkan pihak-pihak tertentu dengan alasan bahwa kebijakan tersebut justru menghina kaum perempuan dengan meminta-minta kekuasaan. Di tengah pro dan kontra, perjuangan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen terus dilakukan sebagai pembuktian bahwa pada dasarnya tidak ada yang salah dengan kebijakan *affirmative action*, namun apa pun implikasinya, perjuangan harus terus dilakukan sehingga keterwakilan perempuan benar-benar nyata dan rasional. Artinya, keterwakilan perempuan di politik/parlemen dan ranah publik lainnya muncul dari realitas rasional yang mampu melahirkan keadilan bagi semua pihak.

Perjuangan kaum perempuan tentu tidaklah mudah di tengah kondisi kualitas komunikasi politik kaum perempuan yang masih kurang, kaderisasi partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan realitas persoalan-persoalan sosial budaya bahkan agama yang mengitari kaum perempuan. Artinya, upaya perjuangan tidak boleh berhenti dan harus terus dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan jaringan kerja bersama (*alliance of network*). Jaringan kerja sama yang kuat akan mampu menciptakan kekuatan (*power*) bersama sehingga memudahkan memperjuangakan target isu perjuangan yang ditetapkan.

Dalam perjuangan bersama untuk menciptakan masyarakat sipil *(civil society*) yang mandiri, kuat dan rasional, perempuan sebagai masyarakat sipil yang dianggap lemah harus menjelma menjadi masyarakat politik *(political society*) yang kuat, adil dan menyejahterakan bagi semua. Perjuangan kaum perempuan harus mampu menciptakan pertukaran posisi kekuasan (*war position*) antara masyarakat politik dengan masyarakat sipil sehingga keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar angka-angka, melainkan juga esensi dan kualitasnya.

Dalam proses pertukaran posisi tersebut, perempuan tidak mungkin melakukan sendiri dan mengabaikan komponen-komponen ke-

kuasaan lainnya. Salah satu komponen yang dominan adalah media massa. Media massa adalah sistem sosial baru di tengah masyarakat politik. Politik tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan media massa, demikian juga dengan media massa yang merupakan instrumen yang membuat politik semakin gegap gempita. Realitasnya, perempuan belum menjadi isu menarik bagi media karena perempuan dianggap tidak memilih isu-isu yang menarik dibandingkan isu-isu yang dipilih laki-laki. Media juga belum memihak perempuan karena cenderung menganggap kualitas komunikasi politik kaum perempuan yang belum memadai. Namun demikian, perempuan dapat memanfaatkan media semaksimal mungkin, salah satunya dengan memanfaatkan media-media komunitas. Persoalan yang krusial adalah bagaimana memengaruhi media dan menarik bagi media dengan aktivitas politik yang dilakukan perempuan. Aktivitas ini merupakan aktivitas bersama yang menyejahterakan bukan hanya untuk kepentingan politik praktis.

Terima kasih dan tanda syukur yang sangat besar kepada Allah Swt. yang mengizinkan kreativitas alam pikir dan akal budi sehingga buku ini, yang merupakan pengembangan dari disertasi penulis, dapat menjadi salah satu buku dalam khazanah politik dan perempuan di Indonesia. Terima kepada kedua orang tua penulis, Abu Abdul Wahid Hanafiah dan Ummi Sitti Maryam (alm), yang selalu mengingatkan penulis bahwa hidup harus bermuara pada kebesaran Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw., serta untuk tidak pernah pernah lupa menanam dan memberi kebaikan kepada siapa pun. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kanda Ir. Ahmadi A. Wahid dan Kak Dr. Anidar A. Latief karena telah menjadi bagian terpenting dalam perjuangan penulis, termasuk dalam penerbitan buku ini. Kanda Azhar A. Wahid, Kanda Mardhiah A. Wahid dan Kanda Jalaluddin A. Wahid serta keluarga. Keluarga adalah tempat kembali kapan pun walau di belahan bumi yang lain terabaikan. Penulisan ini dapat dibaca sebagai buku tidak lepas dari kebaikan dan rasa sayang Emak R.A. Toeminem Misman dan keluarga besar Bapak Misman Wiryosentono. Emak

yang senantiasa menyediakan waktu menemani kaka Adek dan memahami kondisi yang ada.

Penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas pemahaman yang sangat baik dan dukungan yang besar dari Ayah Amran Zamzami (alm) dan ibu; kepergian ayah Amran merupakan kehilangan yang besar bagi generasi muda Aceh. Semoga generasi muda Aceh menjadi generasi muda yang mandiri, kuat dan berkarakter, serta mempunyai visi dan misi ke depan sebagai upaya menjadikan Aceh tetap sebagai bagian dari Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A., sebagai promotor, Francisia SEE Seda, M.A., Ph.D., yang berkenan membimbing penulis dengan segala keterbatasan yang penulis miliki. Dr. Marwah Daud Ibrahim, M.A., yang meskipun sibuk untuk kemaslahatan umat namun tetap berkenan menjadi bagian dari proses ini dan sekaligus berkenan menyematkan kata pengantar untuk buku ini.

Ucapan terima kasih atas dedikasi di tengah aktivitas yang sibuk ingin penulis sampaikan kepada Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., yang bersedia menuliskan kata pengantar dan narasumber penelitian. Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A., sebagai penguji tamu dari UGM Yokyakarta. Ketua Program Ilmu Komunikasi, Dedy N. Hidayat, Ph.D (alm) dan seluruh staf pengajar Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi. Tim Penguji: Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A., Francisia SSE Seda, M.A., Ph.D, Dr. Marwah Daud Ibrahim, M.A., Dedy N. Hidayat, Ph.D., Prof. Andre Hardjana, Ph.D., Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A. S. Djuarsa Sendjaya, Ph.D., Dr. Billy K. Sarwono, MA. dan Edward Luckman, M.A.

Terima kasih kepada H. Bustanil Arifin, H. Yusuf Gading dan Ibu Hj. Rohana Yusuf Gading, Drs. Said Umar Husien dan Tjut Ellyzar, Kanda Dr. Mustafa Abubakar, K.H. Salahuddin Wahid, Utomo Dananjaya, Kanda Jamail Hasan, Kanda (alm) Iskandar Jamil,

Prof. Dr. Syamsuddin Machmud, T. Umar Hasan, Bang Lian Sahar, Prof. Dr. Bachtiar Aly, Najib Ibrahim, Ali Jauhari, Kanda Mustafa Harun, Kanda A. Rachman TB, dan lain-lain, yang membantu mendukungan pembiayaan dalam proses perkuliahan dan penelitian

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber dalam penelitian disertasi: Daniel Dhakidae, Maria Hartiningsih dan Ninuk Mariana Pambudi dari Kompas, Toety Adhitama dan Ja'far Assegaf dari Media Indonesia, Tumbu Sarawati, Noviantika Nasution dan Teras Narang dari F PDI-P, Nursyahbani Katjasungkana (FKB), Hamdan Zoelva (PBB), Hj. Juniawati M. Softjan (PGK), Titi Sumbung (Pusat Pengembangan Perempuan dalam Politik), Chusnul Mar'iyah, Ph.D. (KPU dan ahli politik), Francisia SSE Seda (Sosiolog dan Cetro), Smita Notosusanto dan Anie Sutjipto (Cetro).

Organisasi adalah tempat melakukan aplikasi dari ilmu dan sekaligus memperkaya pengalaman yang mencerahkan dalam proses pengembangan diri dan lingkungan. Terima kasih kepada Taman Iskandar Muda (TIM), Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA), Asosiasi Dosen Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Terima kasih atas dukungan Alam Puassaba, Rachmat Baihaqi, Ravie, Yulia Rachman, Dewi Erna, Aan Anisa, Muawan, dan lain-lain. Kalian telah menjadi bagian keluarga yang sangat memahami. Sukses untuk karir dan keluarga.

Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam buku ini. Semua kesalahan menjadi tanggung jawab penulis. Semoga Allah Swt. menganugerahkan kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik bagi kita sehingga kita mampu menciptakan perjuangan baru bagi kebangkitan nilai-nilai kemanusiaan.

Jakarta, 3 Maret 2014
Umaimah Wahid

Daftar Isi